



LAPORAN BARANG KUASA PENGUNA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEMESTER I TAHUN 2026





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 Semester I merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 Semester I ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,



PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 Semester I, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung
selaku
Kuasa Pengguna Barang



UJANG SOLIHIN



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNBPN (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (jika ada)**
16. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
17. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Semester I* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 *Semester I*.

Penyusunan LBKP *Semester I* ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP *Semester I* ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-154/PB/2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP *Semester I* ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:



1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca per 30 Juni 2026 adalah Rp26.917.657.063,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2026 sebesar Rp26.896.237.063,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp21.420.000,00;
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp21.420.000,00;
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (5) Koreksi Nilai Berkurang dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar 0;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
6. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP *Semester I* ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2026 *Semester I*. Penyusunan LBKP *Semester I* yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.



Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP *Semester I* ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP *Semester I* secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;



- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pmutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul



Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.



LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu



Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:



1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, dalam LBKP Tahun 2026 Semester 1 ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah



Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan



Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebesar Rp26.917.657.063,00 (*Dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp26,896,237,063,00 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2026 sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp21,420,000,00 (*Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu*) dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah.*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

(paragraf berikut ini hanya untuk narasi Laporan Barang Pengguna Wilayah/LBPW)

Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) Bangka Belitung periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan himpunan dari LBKP pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Kuasa Pengguna Barang. (untuk LBP-W)

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2026
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);



7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp26,896,237,063 (Dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp26,879,843,063 (*Dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp37,814,000,00 (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.126.500,00 (*Empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus*



rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.052.000	1.895.000	2,947,000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.499.000	319.500	1,179,500

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*nol rupiah*)

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.796.301.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 11,230 m² dengan nilai sebesar Rp10.796.301.000,00 (*Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus satu ribu rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp6.089.258.000,00 (*Enam miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah

Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
-	-

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah



Dari jumlah/ nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	11.230	10.796.301.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 771 buah dengan nilai sebesar Rp4,158,761,206,00 (*Empat miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 746 buah dengan nilai sebesar Rp4,137,341,206,00 (*Empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam*), mutasi tambah sebanyak 10 buah dengan nilai sebesar Rp160.430.190,00 (*Seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah.*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 (*0 rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 341 buah dengan nilai sebesar Rp306.280.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat besar di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Besar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	306.280.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 7. Kondisi Alat Besar

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 16 buah dengan nilai sebesar Rp928.403.912,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Besar



Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Besar

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, Saldo Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16	928.403.912
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

c. Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin



Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Bengkel Bermesin

Dari jumlah Alat Bengkel Bermesin di atas, Saldo Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Bengkel Bermesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 13. Kondisi Alat Bengkel Bermesin

Kelompok barang Alat Bengkel Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

d. Alat Kantor(3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp482.449.426,00 (*Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	125	482.449.426
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 16. Kondisi Alat Kantor

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

e. Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.270.889.018 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.143.038.828 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah.*), mutasi tambah sebesar Rp127.850.190 (*Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	127.850.190	-



Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	500	1.270.889.018
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 19. Kondisi Alat Rumah Tangga

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

f. Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp130.561.000 (*Satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah.*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



-	-	-
---	---	---

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14	130.561.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 22. Kondisi Alat Studio

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

g. Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.039.250 (*Empat puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-



Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	20	47.039.250
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Komunikasi

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

h. Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Alat Komputer Unit pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp702.730.668 (*Tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp683.100.668 (*Enam ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp19.630.000 (*Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	19.630.000	-



Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	49	702.730.668
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

i. Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp270.427.932 (*Dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp268.987.932 (*Dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 1.440.000 (*Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transaksi Masuk	-	1.440.000



Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	37	270.427.932
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 31. Kondisi Komputer Unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.830.737.220,00 (*Tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin intrakomptabel sebesar Rp368.194.167,00 dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel sebesar Rp4.934.000,00.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2026



adalah sebesar Rp 11.955.927.748 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 5.860.584.400,00 (*Lima miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah*), dan mutasi tambah sebesar Rp 8.921.850.486 (*Delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 2.826.507.138 (*Dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp8.960.227.748,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.864.884.400,00, mutasi tambah sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp8.921.850.486,00 dan mutasi kurang sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp2.826.507.138,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	8.921.850.486,00	-

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	2.826.507.138,00	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Kerja berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	8.921.850.486,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Kerja

b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 17 buah dengan nilai sebesar Rp2.995.700.000,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	...

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
...	...	...

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah dengan nilai



sebesar Rp0.

Rincian data Bangunan Gedung Tempat Tinggal berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	17	2.995.700.000,00
Rusak Ringan	...	...
Rusak Berat	...	...

Tabel 10. Kondisi Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp11.955.927.748,00 (*Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan intrakomptabel sebesar Rp1.335.675.047,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah Jalan dan Jembatan, 0 buah Irigasi, serta 0 buah Jaringan dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah (jalan dan jembatan/irigasi/jaringan) dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah



sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.967.109 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 13. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

b. Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01.03)

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-



Tabel 13. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Mutasi Kurang Kartografi, Naskah dan Lukisan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Tabel 14. Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp6.667.109 (*Enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan intrakomptabel sebesar Rp0,00 dan akumulasi penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi serta Jaringan ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00, mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per kelompok barang adalah sebagai berikut:

1) Software

Saldo Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, Saldo Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya



Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	0	0
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0	0
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 23. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya per 30 Juni 2026

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang



Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), nilai mutasi tambah sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit. atau Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 30 Juni 2026

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp26,917,657,063,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0
	Sub Jumlah (1)	4.126.500	0	0	0	4.126.500	0



II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	0	0	0	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	0	36.374.000	0	4.158.761.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	0	0	0	11.955.927.748	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0	0	0	6.667.109	0
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26,879,843,063	0	36.374.000	0	26,917,657,063	0

Tabel 26. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	-	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (1)		-	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	10.796.301.000	40	0	0	10.796.301.000	40
2	Peralatan dan Mesin	4.100.967.206	15	36.374.000	100	4.137.341.206	15
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	44,8	-	0	11.955.927.748	44,8
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0	-	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	0,2	0	0	6.667.109	0,2
6	KDP	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (2)		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	-	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0



3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
Sub Jumlah (3)		0	0	0	0	0	0
Total		26.859.863.063	100	36.374.000	100	26.896.237.063	100

Tabel 26. Nilai Akumulasi Penyusunan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 per 30 Juni 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No .	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	4.126.500	4.126.500	0
1	Persediaan	4.126.500	4.126.500	0
II	Aset Tetap	21.791.414.977	21.791.414.977	0
1	Tanah	10.796.301.000	10.796.301.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,120,947,206	4.100.967.206	0
3	Gedung dan Bangunan	11.955.927.748	11.955.927.748	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	6.667.109	6.667.109	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	610.458.285	610.458.285	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,334,642,876)	(5,334,642,876)	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		22,159,784,972	22,159,784,972	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Tabel 27. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat



selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan 2023	20.640.463.525	-	-
2	Laporan 2024	20.640.463.525	1.153.502.452	5,59%
3	Laporan 2025	21.793.965.977	1.153.502.452	5,59%

Tabel 27. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung per Periode Laporan

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	5	10.796.301.000
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	16	928.403.912
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	667	1.950.918.694
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	86	973.158.600
5	Alat Berat	-	-	2	306.280.000
6	Bangunan Gedung	-	-	2	8.960.227.748
7	Rumah Negara	-	-	17	2.995.700.000
8	Jalan dan Jembatan	-	-	0	0
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	0	0
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	0	0



11	Aset Tetap lainnya	-	-	38	6.667.109
12	Aset Tak Berwujud	-	-	0	0
JUMLAH		-	-	833	26.917.657.063

Tabel 28. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

b. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah- tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 29. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026



c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 30. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2026 per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung per 30 Juni 2026.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN Semester I tahun 2026. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.



g. Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya yang perlu disampaikan.

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak ada perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	-	-

Tabel 34. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2025 dan Tindak Lanjutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2026.

a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2028 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pemeliharaan	Bangunan gedung kantor	Pengajuan
2	Pemeliharaan	Bangunan rumah negara	Pengajuan
3	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 4	Pengajuan
4	Pemeliharaan	Kendaraan dinas roda 2	Pengajuan
5	Pemeliharaan	Peralatan dan mesin TIK dan Non TIK	Pengajuan



Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 0 usulan dan tidak disetujui sebanyak 0 usulan

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak mengajukan usulan RP33BMN untuk tahun 2028.

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 833 unit dengan nilai sebesar Rp20.800.893.715,00. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0	5	10.796.301.000	5	10.796.301.000
Alat Angkutan Bermotor	0	0	16	928.403.912	16	928.403.912
Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	667	1.950.918.694	667	1.950.918.694
Peralatan dan Mesin TIK	0	0	86	973.158,600	86	973,158,600
Alat Berat	0	0	2	306,280,000	2	306,280,000
Bangunan Gedung	0	0	2	8.960.227.748	2	8.960.227.748
Rumah Negara	0	0	17	2,995,700,000	17	2,995,700,000
Jalan dan Jembatan	-	-	0	0	0	0
Instalasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Bangunan Air dan Irigasi	0	0	0	0	0	0
Aset Tetap lainnya	0	0	38	6,667,109	38	6,667,109
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	833	26.917.657.063	833	26.917.657.063

c. Pengelolaan BMN

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan permohonan terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP), penjualan BMN berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang.



2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang yang telah diterbitkan persetujuan/keputusannya.
4. Selesai Serah Terima
Selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan nilai sebesar Rp21.420.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL26043009471611827	PSP	19.980.000
2	PPL26052015581452381	PSP	1.440.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

Nomor : 144/SEK.PTA.W28-A/PL1.2.5/VII/2026 Pangkalpinang, 21 Juli 2026
Sifat : Terbatas Lampiran
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semester I Tahun 2026

Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

c.q. Kepala Biro Perlengkapan di
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL1.2.7/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung,

SUANG SOLIHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Selaku Koordinator Wilayah).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 440728 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/04/26 9:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,545,000	0	1,545,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,419,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	33,978,996	0	33,978,996	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	30,419,000	35,523,996	0	35,523,996	116.78
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	60	0	60	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	60	0	60	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	30,419,000	35,524,056	0	35,524,056	116.78
	JUMLAH PENDAPATAN	30,419,000	35,524,056	0	35,524,056	116.78



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

Pangkalpinang, 21 Juli 2026

RESUME PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Laporan Asuransi BMN Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan kegiatan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN). Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengamanan BMN, tidak terdapat objek BMN yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengasuransian sesuai ketentuan dan kebijakan pengelolaan BMN yang berlaku. Dengan demikian, nilai pertanggungan dan premi asuransi pada Tahun 2026 adalah nihil (Rp0,-).

2. Klaim Asuransi BMN Tahun 2026

- a. Pada Tahun 2026 tidak terdapat pengajuan klaim asuransi BMN karena tidak terdapat BMN yang diasuransikan.
- b. Tidak terdapat klaim asuransi BMN tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian pada Tahun 2026.

3. Rencana Pengasuransian BMN Tahun 2026

Untuk Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung belum merencanakan kegiatan pengasuransian BMN.

Namun demikian, satuan kerja akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi BMN serta mempertimbangkan pengasuransian apabila di kemudian hari terdapat BMN yang memenuhi kriteria untuk diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkalpinang, 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung



Ujang Solihin

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Selaku Koordinator Wilayah).



PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nomor KDP	Saldo Awal KDP	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP (Rp)	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp Murni/Pinjaman)	Uang Muka	Retensi	Keterangan *)			Catatan
															Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
1	440/28	Pengadilan Tipikal Asrama Kepulauan Bangka Belitung	7010101003	1	86,617,738	111/PPK-PTA-W28/A/2011.1.7/VII/2025	21 Juli 2025	18 Desember 2025	5.429.820.000	5.680.000.000	100%	Murni	-	-	v			Kontrak Konsultan
					Total KDP					5.680.000.000	100.00%							

[illegible]

	57	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	9902A Pengujian Negatif Sanyalung	401010007	6	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	STAF	18/09/2017 ULUP1.2.5 R0002-2.1	175.000	A. A Yaw Jauz D (Nompas RRS)	BAKAT BETUNG SUNGAILAL BANGKA	BANGKA BELITUNG	18.874.478	1.061.962.738	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	58	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	9902A Pengujian Negatif Sanyalung	401010007	7	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.5 R0002-2.1	175.000	A. A Yaw Jauz D (Nompas RRS)	BAKAT BETUNG SUNGAILAL BANGKA	BANGKA BELITUNG	18.874.478	1.061.962.738	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	59	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	9902A Pengujian Negatif Sanyalung	401010007	8	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	STAF	18/09/2017 ULUP1.2.5 R0002-2.1	175.000	A. A Yaw Jauz D (Nompas RRS)	BAKAT BETUNG SUNGAILAL BANGKA	BANGKA BELITUNG	18.874.478	1.061.962.738	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	60	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	9902A Pengujian Negatif Sanyalung	401010007	9	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.5 R0002-2.1	175.000	A. A Yaw Jauz D (Nompas RRS)	BAKAT BETUNG SUNGAILAL BANGKA	BANGKA BELITUNG	18.874.478	1.061.962.738	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	61	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	9902A Pengujian Negatif Sanyalung	401010007	10	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.5 R0002-2.1	175.000	A. A Yaw Jauz D (Nompas RRS)	BAKAT BETUNG SUNGAILAL BANGKA	BANGKA BELITUNG	18.874.478	1.061.962.738	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	62	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	2138B Pengujian Agama Berjangkung	401010004	1	Rumah Negeri Gelombang II Tipe B Permanen	Rusak Berat	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010001	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 535	Dokumen sendiri untuk operasional	KETUA	21/05/2018 AN-R02- 43/06-01/12/2015	51.414	A. Anwar No.85	PANGKALANLALA TANJUNGPINANG KAB. BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.708.8913	127.690.687	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	63	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	1	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 538 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk operasional	KETUA	07/05/2017 ULUP1.2.1/2/2015	387.500	A. Kikla Desa Dul	DESA DUL PANGKALAN BARU KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	64	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	1	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 538 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	65	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	2	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	66	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	3	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	67	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	4	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 518 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk operasional	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	68	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	5	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 518 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	69	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	7	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	3	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	70	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	8	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	3	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	71	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	9	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 518 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	72	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	10	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 518 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	73	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	11	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	74	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99020 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010007	12	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 262 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Kikla Desa Dul	Dul	Pengkalan Baru KAB. BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	21.523.472	1.612.962.334	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	75	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	13	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	76	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	99010 Pengujian Negatif Pengkal Puang	401010001	14	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 52 Tahun 1992 dan rera Peraturan RI cq Maklumlah Ageng RZ	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Hasil	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	A. Samudra Sudirman Subandito	SELINDING BARU GABEK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.093.993.993	1.611.170.466	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai	
	77	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	1	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010401	3	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	312/09/1991-171/2020/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	KETUA	30/05/2018 AN-R12/02/2015	136.631	A. Sukarno Hutan No. 271	Sembung Baru GIMPAK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.143.88831 186.121400312	279/87-75 130 ⁰ 07/24-75	Hasil perubahan kode bearing untuk bangunan yang telah terdapat perubahan data	Terdapat Perubahan Data	
	78	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	5	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Rusak Ringan	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	40125/04 Kapala 15/04/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Isain Puto	008/003	01/04/2017	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai		
	79	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	6	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Rusak Ringan	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	40125/04 Kapala 15/04/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Isain Puto	008/003	01/04/2017	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai		
	80	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	7	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Rusak Ringan	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	40125/04 Kapala 15/04/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Isain Puto	008/003	01/04/2017	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai		
	81	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	1	Rumah Negeri Gelombang II Tipe D Permanen	Rusak Ringan	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	40125/04 Kapala 15/04/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	PANITERA	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Isain Puto	008/003	01/04/2017	Hasil perubahan kode bearing untuk bangunan yang telah terdapat perubahan data	Terdapat Perubahan Data		
	82	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	402302 Pengujian Agama Berjangkung	401010007	2	Rumah Negeri Gelombang II Tipe D Permanen	Rusak Ringan	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010401	3	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	312/09/1991-171/2020/2015	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	PELINDING	30/05/2018 AN-R12/02/2015	116.424	A. Sukarno Hutan No. 271	Sembung Baru GIMPAK KOTA PANGKALANPIANG	BANGKA BELITUNG	2.143.88831 186.121400312	279/87-75 130 ⁰ 07/24-75	Hasil perubahan kode bearing untuk bangunan yang telah terdapat perubahan data	Terdapat Perubahan Data	
	83	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010004	3	Rumah Negeri Gelombang II Tipe B Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 39	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	WAKIL KETUA	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.746.115	187.651.511	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	84	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010004	4	Rumah Negeri Gelombang II Tipe B Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	2	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 27	Dokumen sendiri untuk diars jabatan	Isain Puto	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.772.211	187.446.361	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	85	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	3	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	3	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 38	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.747.403	187.650.712	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	86	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	4	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	4	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 38	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.747.403	187.650.712	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	87	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	5	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 28	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.726.418	187.442.255	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	88	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	6	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 28	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.726.418	187.442.255	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	89	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	7	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 28	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.726.418	187.442.255	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	90	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	8	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 28	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.726.418	187.442.255	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai
	91	5	Maklumlah Ageng RZ	1	Badan Usaha Administrasi	400500 Pengujian Negatif Berjangkung	401010007	9	Rumah Negeri Gelombang II Tipe C Permanen	Bak	Pemerintah RI cq Maklumlah Ageng RZ	201010100	1	Tanah Bangunan Rumah Negeri Gel.	Sudah	SNP No. 28	Dokumen sendiri untuk operasional	HAKIN	18/09/2017 ULUP1.2.1/2/2015	185.000	Isain Puto	Pangkal lantang Tanjungpinang	Kab. Belitung BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	2.726.418	187.442.255	Dokumen sendiri untuk operasional dengan kelengkapan	Data TetaH Sesuai

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/04/26 2:14 PM

Tgl Cetak : 24/04/26 9:51 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,590,795	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,052,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,499,000	0
0.0	131111	Tanah	10,796,301,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,100,967,206	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,667,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,732,773,039
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,335,675,047
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,544,912,770
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,647,929
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,461,995,117
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	35,524,056	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	52,080,000
0.0	391111	Ekuitas	0	15,999,961,116
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,545,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	33,978,996
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	60
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,961,314,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,768	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	111,600,000	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,241,450	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	93,870,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	106,500,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	19,827,362	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	69,305,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	255,368,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17,540,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	126,900,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,645,381,625	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	6,498,600,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	163,295,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,316	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,320,320	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,924,448	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,840,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,325,280	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	37,293,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/04/26 2:14 PM

Tgl Cetak : 24/04/26 9:51 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	5,060,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	475,380,071	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,107,449	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	51,000,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,514,729	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,598,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	394,865,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,093,800	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	156,204,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196,974,081	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	116,241,584	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,630,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	217,333,362	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	241,221,475	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	37,227,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,834,500	0
JUMLAH			40,166,569,074	40,166,569,074

Keterangan :

SUDAH FINAL

PANGKALPINANG, 27 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

UJANG SOLIHIN

NIP 197011191997031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (440728) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 24/04/26 2:14 PM

Tgl Cetak : 24/04/26 9:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,590,795	1,640,330	(49,535)	(3.02)
Persediaan	2,551,000	4,349,000	(1,798,000)	(41.34)
JUMLAH ASET LANCAR	4,141,795	5,989,330	(1,847,535)	(30.85)
ASET TETAP				
Tanah	10,796,301,000	10,796,301,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,100,967,206	3,941,237,016	159,730,190	4.05
Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	5,860,584,400	6,095,343,348	104.01
Aset Tetap Lainnya	6,667,109	6,667,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,068,448,086)	(4,609,893,249)	(458,554,837)	9.95
JUMLAH ASET TETAP	21,791,414,977	15,994,896,276	5,796,518,701	36.24
JUMLAH ASET	21,795,556,772	16,000,885,606	5,794,671,166	36.21
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,548,560,699	924,490	1,547,636,209	167,404.32
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,548,560,699	924,490	1,547,636,209	167,404.32
JUMLAH KEWAJIBAN	1,548,560,699	924,490	1,547,636,209	167,404.32
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	20,246,996,073	15,999,961,116	4,247,034,957	26.54
JUMLAH EKUITAS	20,246,996,073	15,999,961,116	4,247,034,957	26.54
JUMLAH EKUITAS	20,246,996,073	15,999,961,116	4,247,034,957	26.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,795,556,772	16,000,885,606	5,794,671,166	36.21

Keterangan :

SUDAH FINAL

PANGKALPINANG, 27 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

UJANG SOLIHIN

NIP 197011191997031003



MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 12

satker : 440728

No	BAES1	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	132111	Peralatan dan Mesin	52,080,000	00501	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	52,080,000	0

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DATA LAPORAN ASET SENKETA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

No	Kode Satker	Wilayah	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jlh Bidang Tanah	Luas	Nilai Perolehan	Jenis Dokumen Kepemilikan Tanah	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Status Penggunaan	Substansi Permasalahan	Bersengketa / Bermasalah	Keterangan	Status	Data Dukung
1	005010600440728 000KD	Bangka Belitung	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	NIHIL															

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NIHIL								

NAMA SATKER
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH KELUAR BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Audited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NIHIL								

NAMA SATKER
RINCIAN TRANSAKSI HIBAH MASUK BMN BERUPA ASET TETAP
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 (Audited)

No	Kode Satker	Nama satker	Jenis Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Bulan Transaksi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NIHIL								

MAHAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH BANGKA BELITUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH BANGKA BELITUNG
005013000440728000K - PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BHN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025

No Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Dokumen Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jum	Nilai Satuan	Nilai	No Sp2d	Penjelasan	
1	Bangka Belitung	005013000440728000K D	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	13/PPK/PTA.W28-A/PL1.1/II/2025	05-02-2025	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Pengelolaan Kegiatan	4010101001	1	11553000	11553000	250151301000896	Merupakan kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya tercatat sebagai KDP, satuan kerja telah melakukan koreksi pencatatan untuk memperbaiki kuantitas atau jumlah nup gedung dengan menghapus 3 nup yang salah, dan input koreksi nilai bertambah pada kode barang 7010101003, transaksi selanjutnya akan dilakukan kedalam pengembangan KDP sampai dengan renovasi selesai.
2	Bangka Belitung	005013000440728000K D	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	23/PPK/PTA.W28-A/PL1.1.5/II/2025	12-02-2025	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja perjalanan dinas pengelolaan kegiatan belanja modal	4010101001	1	10308000	10308000	250151301001157	Merupakan kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya tercatat sebagai KDP, satuan kerja telah melakukan koreksi pencatatan untuk memperbaiki kuantitas atau jumlah nup gedung dengan menghapus 3 nup yang salah, dan input koreksi nilai bertambah pada kode barang 7010101003, transaksi selanjutnya akan dilakukan kedalam pengembangan KDP sampai dengan renovasi selesai.
3	Bangka Belitung	005013000440728000K D	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	49/PPK/PTA.W28-A/PL1.1.3/IV/2025	23-04-2025	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembelian ATK berupa kertas dll Renovasi Gedung Kantor	4010101001	1	1891000	1891000	250151302001309	Merupakan kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya tercatat sebagai KDP, satuan kerja telah melakukan koreksi pencatatan untuk memperbaiki kuantitas atau jumlah nup gedung dengan menghapus 3 nup yang salah, dan input koreksi nilai bertambah pada kode barang 7010101003, transaksi selanjutnya akan dilakukan kedalam pengembangan KDP sampai dengan renovasi selesai.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Periode Semester I Tahun Anggaran 2026
NOMOR: 110/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung alamat Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008
Jabatan : Operator GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I	POSISI BMN DI NERACA	21,564,145,187	(14,818,500)	22,159,784,972
A.	ASET LANCAR	2,551,000	1,575,500	4,126,500
1	Persediaan	2,551,000	1,575,500	4,126,500
B.	ASET TETAP	21,561,594,187	(16,394,000)	22,155,658,472
1	Tanah	10,796,301,000	-	10,796,301,000
2	Peralatan dan Mesin	4,137,341,206	(16,394,000)	4,120,947,206
3	Gedung dan Bangunan	11,955,927,748	-	11,955,927,748
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	6,667,109	-	6,667,109
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	610,458,285
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,334,642,876)	-	(5,334,642,876)
C.	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	36,374,000	-	37,814,000
1	Ekstrakomptabel	36,374,000	1,440,000	37,814,000
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
III	TOTAL GABUNGAN (I+II)	21,600,519,187	14,818,500	22,197,598,972

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009

Operator GLP

NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung

UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 197011191997031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Periode Semester I Tahun Anggaran 2026
NOMOR: 109/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung alamat Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008
Jabatan : Operator GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
I	POSISI BMN DI NERACA	-	-	-
A.	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B.	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
C.	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
II	BMN NON NERACA	-	-	-
1	Ekstrakomptabel	-	-	-
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
III	TOTAL GABUNGAN (I+II)	-	-	-

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

RAMADHANA KURNIA PUTRA WIJAYANTO, S.T.
NIP : 19960205 202506 1 009

Operator GLP

NIFA NOVALIN, S.S.T.
NIP : 19931102 202203 2 008

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 197011191997031003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

HASIL OPNAME FISIK

Nomor : 112/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440728
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih*)	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
ALAT TULIS								
1	Pena Snowman	000101	3	3		Baik		
2	Spidol Boardmaker	000203	2	2		Baik		
3	Stabillo	000301	1	1		Baik		
4	Pena Joyko	000420	1	1		Baik		
5	Stabillo Kecil	000421	1	1		Baik		
6	Rautan Pensil	000422	1	1		Baik		
7	Pena Boldliner Standard Biru	000446	1	1		Baik		
PENJEPIT KERTAS								
8	Binder Clips	000201	2	2		Baik		
9	Pelobang Kertas	000301	1	1		Baik		
10	Trigonal Clip No 3	000303	1	1		Baik		
11	Binder Clip 107	000305	6	6		Baik		
12	Binder Clip 155	000306	2	2		Baik		
13	Binder Clip 260	000307	2	2		Baik		
14	Push Pins	000308	1	1		Baik		
PENGHAPUS/KOREKTOR								
15	Penghapus Pensil	000101	6	6		Baik		
16	Tipe X Joyko	000201	4	4		Baik		
17	Tip-X Kertas	000207	1	1		Baik		
BUKU TULIS								
18	Buku Tulis Quarto	000102	1	1		Baik		
19	Buku Folio	000104	6	6		Baik		

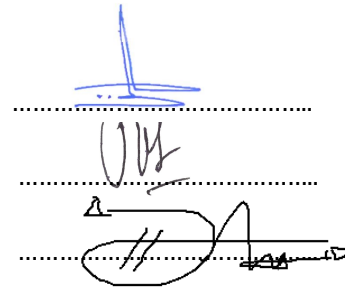
ORDNER DAN MAP							
20	Map Folio	000201	1	1		Baik	
21	Business File	000210	1	1		Baik	
22	Map Resliting	000217	1	1		Baik	
23	Map Biola2	000218	1	1		Baik	
PENGGARIS							
24	Penggaris Besi 30 cm	000201	2	2		Baik	
CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)							
25	Cutter Combo	000105	5	5		Baik	
ALAT PEREKAT							
26	Isolasi Bening Kecil	000401	2	2		Baik	
27	Double Tape Busa	000407	2	2		Baik	
28	Lem Glue Stick 40gr	000410	3	3		Baik	
29	Double Tape 1"	000411	3	3		Baik	
30	Isolasi Kecil1	000413	1	1		Baik	
31	Lakban Bening ½	000414	3	3		Baik	
STADLER HD							
32	Stapler HD 10	000101	4	4		Baik	
33	Stapler HD 50	000201	1	1		Baik	
34	Isi Staples no 10 (new)	000503	1	1		Baik	
ISI STAPLES							
35	Isi Staples No.10	000001	4	4		Baik	
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA							
36	Gunting	000102	6	6		Baik	
37	Transparent Flag Tj44.8	000107	2	2		Baik	
38	Clip Board Acrilic	000115	2	2		Baik	
39	Post IT	000118	1	1		Baik	
40	Gunting Besar	000117	1	1		Baik	
41	Gunting Sedangg	000118	1	1		Baik	
42	Label Undangan No 121	000120	2	2		Baik	
43	Label	000122	1	1		Baik	
KERTAS HVS							
44	Kertas A4	000311	1	1		Baik	
45	Kertas F4	000301	1	1		Baik	
46	Kertas F4 70 gr	000303	1	1		Baik	
47	Kertas A4 80 Sidu	000307	1	1		Baik	
48	Kertas HVS A4 75gr	000310	1	1		Baik	
BERBAGAI KERTAS							
49	Tissu Jolly 560 Gr	000109	4	4		Baik	
50	TIssu Jolly 560 Gr	000110	2	2		Baik	
KERTAS COVER							

51	Kertas Kado Besar	000107	1	1		Baik		
AMPLOP								
52	Amplop Putih Kecil	000201	1	1		Baik		
53	Amplop Putih Besar	000202	1	1		Baik		
KERTAS DAN COVER LAINNYA								
54	Stiker Glossy	000113	1	1		Baik		
BAHAN KOMPUTER LAINNYA								
55	Mousepad	000003				Baik		
TINTA CETAK								
56	Tinta Blueprint Canon B, C, M, Y	000017	1	1		Baik		
SAPU DAN SIKAT								
57	Sikat WC	000002	1	1		Baik		
58	Kit Ban	000006	1	1		Baik		
59	Kuas Ban	000008	2	2		Baik		
ALAT-ALAT PEL DAN LAP								
60	Busa Cuci Piring	000007	1	1		Baik		
61	Kanebo	000010	3	3		Baik		
62	Kanebo2	000026	3	3		Baik		
KESET DAN TEMPAT SAMPAH								
63	Tempat Sampah Uk. 15 L	000015	2	2		Baik		
64	Plastik Sampah	000016	1	1		Baik		
KUNCI, KRAN DAN SEMPROTAN								
65	Kran Air	000002	1	1		Baik		
BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH								
66	Herbatop	000001	1	1		Baik		
67	Sunlight	000005	1	1		Baik		
68	Wipol	000007	1	1		Baik		
69	Cling	000009	13	13		Baik		
70	Sunlight Lime	000012	9	9		Baik		
71	Nuvo sabun cair	000016	4	4		Baik		
72	Handsoap Botol Pump	000023	1	1		Baik		
73	Wipol Lemon	000027	8	8		Baik		
74	Shampo Mobil	000036	1	1		Baik		
75	Kit Ban2	000039	1	1		Baik		
76	Sunlight2	000042	1	1		Baik		
77	Kit Ban Refill	000046	1	1		Baik		
ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM								
78	sendok	000025	1	1		Baik		
PENGHARUM RUANGAN								
79	Stella Gantung	000104	10	10		Baik		
80	Refill Glade	000111	2	2		Baik		

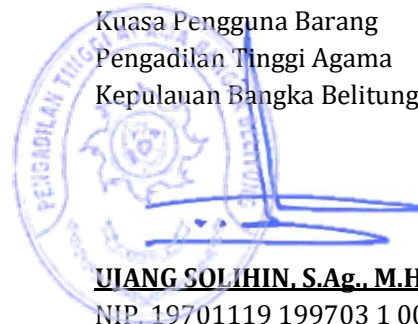
KUAS								
81	Kuas Ban2	000001	2	2		Baik		

Tim Pelaksana Opname Fisik :

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom.
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Tinggi Agama
 Kepulauan Bangka Belitung,



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
 NIP. 19701119 199703 1 003

*) Jika terdapat selisih antara Hasil Opname Fisik Atas Persediaan dengan Buku/Aplikasi Persediaan maka ditelusuri perbedaannya dan jelaskan sebab perbedaannya. Penjelasan selisih menjadi formulir Opname Fisik ini.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440728
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026) bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M. (Sekretaris)
NIP : 19701119 199703 1 003
Jabatan : Ketua
2. Nama : Ian Herkartadi, S.Kom (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga)
NIP : 19850525 200904 1 001
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T. (Penata Layanan Operasional)
NIP : 19960205 202506 1 009
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik Persediaan Semester I Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung,



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 19701119 199703 1 003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

HASIL OPNAME FISIK

Nomor : 111/KPB.PTA.W28-A/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440729
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

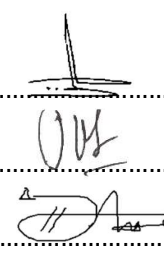
No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih*)	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
NIHIL								

Tim Pelaksana Opname Fisik :

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom.
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung,




UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 19701119 199703 1 003

*) Jika terdapat selisih antara Hasil Opname Fisik Atas Persediaan dengan Buku/Aplikasi Persediaan maka ditelusuri perbedaannya dan jelaskan sebab perbedaannya. Penjelasan selisih menjadi formulir Opname Fisik ini.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptabel@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nama Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode Satker : 440729
UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026) bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M. (Sekretaris)
NIP : 19700709 199603 1 001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Ian Herkartadi, S.Kom (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga)
NIP : 19850525 200904 1 001
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T. (Penata Layanan Operasional)
NIP : 199311022022032008
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik Persediaan Semesteran Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

1. Ujang Solihin, S.Ag., M.H., M.M.
2. Ian Herkartadi, S.Kom
3. Ramadhana Kurnia Putra Wijayanto, S.T.

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama
Kepulauan Bangka Belitung,



UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
NIP. 19701119 199703 1 003